

Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2 2015

Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>

KAJIAN PERENCANAAN TATA RUANG PARTISIPATIF UNTUK MENUNJANG KEGIATAN NON-PERTANIAN DI KECAMATAN WONOSALAM DEMAK

Rizka Fadhilah Adnin¹ Dan Agung Sugiri²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
email : rizkaanin2@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan dapat dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan. Keberadaannya ditandai dengan pengangguran dan ketidakmampuan yang akan meningkatkan kesenjangan sosial. Sektor non-pertanian di pedesaan dapat membantu orang miskin pedesaan untuk mengurangi kemiskinan mereka dengan industri skala mikronya. Kegiatan ini sering beroperasi di sektor informal, namun pengembangannya sering kurang didukung oleh kebijakan tata ruang terkait. Sementara itu, pendekatan partisipatif merupakan komponen penting dalam perencanaan tata ruang di Indonesia, sesuai dengan amanat UU Penataan Ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perencanaan tata ruang partisipatif untuk mendukung pengembangan kegiatan non-pertanian di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Pendekatannya adalah kualitatif dengan analisis isi sebagai metode analisis utamanya. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang diterapkan di daerah penelitian agak menghambat, bukannya mendorong kegiatan non-pertanian. Meskipun rencana tersebut telah mempertimbangkan hubungan spasial dalam beberapa hal, itu belum cukup tepat dalam perencanaan struktur tata ruang untuk mendukung kegiatan non-pertanian. Alasan utama di balik ini yang paling mungkin adalah karena pendekatan top-down yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang. Seandainya penduduk lokal dengan keterlibatan di sektor non-pertanian telah diberikan porsi partisipatif yang tepat dalam proses perencanaannya, situasi akan telah jauh lebih baik. Oleh karena itu, di antara rekomendasi penting studi ini adalah untuk menerapkan pendekatan partisipatif dalam setiap tahap proses perencanaan tata ruang.

Kata kunci: partisipatif, pengentasan kemiskinan, non-farm pedesaan, perencanaan tata ruang, Wonosalam, Demak

Abstract: Poverty can be seen as a part of development problems. Its existence is indicated by unemployment and incapability that would increase social inequality. Rural non-farm sector can help the rural poor to alleviate poverty with its micro-scale industries. The activities often operate in the informal sector, but the development is often less supported by the related spatial policies. Meanwhile, people participatory is an important component in Indonesian spatial planning as mandated by the Law on Spatial Management. This study is aimed at investigating the participatory spatial planning to support the development of rural non-farm activities in Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. The approach is qualitative with content analysis as the main analytical method. The results show that the spatial policy applied in the study area is somewhat obstructing, instead of encouraging the non-farm activities. Although the plan has considered the spatial relations in some respects, it has not been proper enough in planning the spatial structure to support the non-farm activities. The main reason behind this is most probably because of the top-down approach applied in the spatial planning. Had the local people with non-farm engagement been given proper participatory in the spatial planning process, the situation would have been much better. Therefore, among the important recommendations is to implement a participatory approach in every stage of the spatial planning process.

Keywords: *participatory, poverty alleviation, rural non-farm, spatial planning, Wonosalam, Demak*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1993). Seperti kita ketahui, terdapat perbedaan yang jelas mengenai karakteristik kemiskinan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan lebih banyak disebabkan oleh persoalan kurangnya infrastruktur pelayanan dasar, keterbatasan akses, keterjangkauan dan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar, infrastruktur pelayanan dasar yang dimaksud adalah kesehatan, pendidikan, sanitasi dasar dan keterbatasan dalam mata pencaharian. Sedangkan, kemiskinan di perkotaan lebih didominasi oleh kesenjangan penghasilan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kemampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar yang sesuai dan bermartabat (Royat, 2010).

Berdasarkan permasalahan kemiskinan tersebut, maka aktivitas non farm pedesaan telah berkembang dan menjadi penentu yang lebih utama tingkat pendapatan rumah tangga kaum miskin Kusago (2002), Choe dan Lo (1986), Saith (1992), FAO (1998), dan (IFAD 2001). Usaha non pertanian pedesaan biasanya berskala kecil (kurang dari 50 karyawan) dan sering beroperasi di sektor ekonomi informal. Mereka sering dapat dikategorikan sebagai 'industri rumahan' (*cottage industries*) dengan hanya beberapa karyawan, dikerjakan di tempat (*premises*, tanah dan bangunan) sederhana dengan pemasukan kapital (modal produksi) yang terbatas. Sektor tipikal/khas meliputi agribisnis, pekerjaan tukang kayu, menjahit, pembuatan keranjang dan tikar/keset, dan barang tembikar, sementara sektor jasa seperti transportasi, penata rambut, pengobatan dan 'layanan kesekretariatan' juga termasuk.

Oleh karenanya, sangat penting untuk melakukan kegiatan non farm bagi pedesaan untuk mengentaskan kemiskinan. Terdapat

beberapa alasan mengapa penting untuk mengembangkan kegiatan non pertanian di pedesaan, yang pertama dikarenakan interaksi antara desa-kota di Wilayah Metropolitan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin pedesaan. Kedua, tidak terintegrasinya kegiatan non-farm pedesaan terhadap kegiatan sektor pertanian lokal dan ketiga kebijakan publik dan tata ruang bergerak ke arah yang salah.

Dalam jurnal yang berjudul *Sustainable Metropolitan Development: Towards An Operational Model for Semarang Metropolitan Region* (Sugiri, Soetomo dan Buchori 2011; Kusago 2002, Sugiri 1998a) juga mengungkapkan bahwa sektor non pertanian adalah sektor potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, dengan adanya peluang kesempatan kerja pada sektor Non Pertanian pedesaan seperti industri kecil skala rumah tangga, maka dapat menyerap tenaga kerja pedesaan dengan jumlah yang lebih banyak sehingga dapat mengurangi ketertarikan bagi penduduk desa untuk mencari pekerjaan di Kota.

Perencanaan yang partisipatif memberikan peluang yang lebih besar untuk terciptanya pemanfaatan ruang yang terpadu dan sinergis, proses partisipatif dalam tahapan perencanaan tata ruang beserta apa peran dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh para perencana (Shimarmata, 2009).

Proses partisipatif harus dilakukan karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui tentang dirinya dan permasalahannya yang melingkupinya. Oleh karena itu, dalam pengentasan kemiskinan, kebijakan spasial untuk kawasan pinggiran metropolitan harus lebih partisipatif sehingga dapat memfasilitasi dalam pengembangan kegiatan non pertanian pedesaan secara optimal, selain itu juga kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal agar kegagalan kebijakan dapat dihindari.

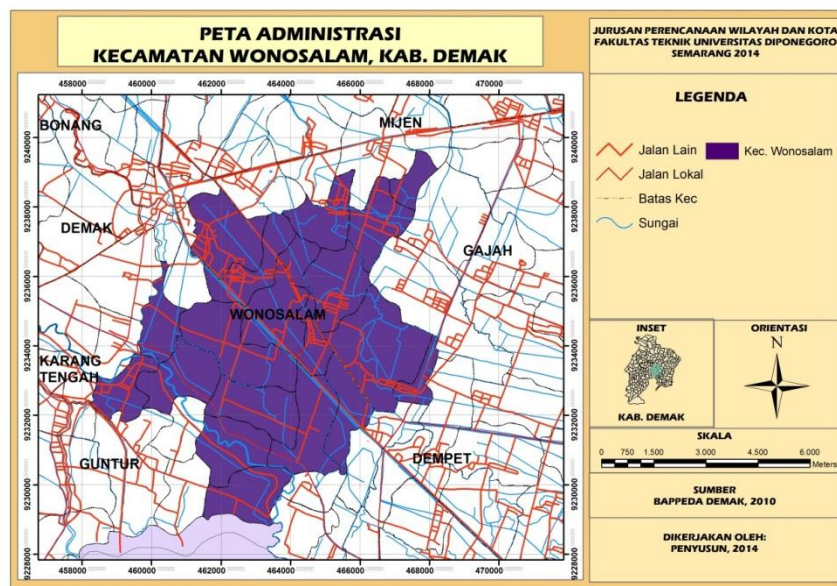
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perencanaan tata ruang partisipatif dalam menunjang pengembangan kegiatan

non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Adapun sasaran nya yaitu: Telaah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, mengkaji persepsi masyarakat terhadap struktur ruang dalam mengembangkan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam, mengkaji persepsi masyarakat terhadap fungsi ruang dalam mengembangkan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam, serta menganalisis keterlibatan masyarakat pelaku

kegiatan non-pertanian dalam perencanaan tata ruang.

Ruang lingkup penelitian ini adalah kecamatan Wonosalam yang memiliki luas 57,83 km², dan terdiri dari 21 desa Potensi lokal merupakan penghasil padi dan tanaman hortikultura jambu air. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki potensi dari sektor non-pertanian pedesaan yang dapat dikembangkan yaitu industri rumah tangga pengolahan makanan, kerajinan dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada gambar 1 merupakan peta administrasi wilayah penelitian di Kecamatan Wonosalam



Gambar 1
Peta Administrasi Wilayah Penelitian Kecamatan Wonosalam

KAJIAN LITERATUR

▪ Kegiatan perekonomian non-pertanian pedesaan

Kegiatan non-pertanian menurut Kristiansen (2003: 8) yaitu *"all income-generating activities except crop and livestock production and fishing and hunting, located in areas that are mainly servicing agricultural activities"*. "semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan kecuali panen dan produksi ternak, memancing dan berburu, yang terletak di area yang melayani kegiatan pertanian". Definisi ini, yang didasarkan pada berbagai penelitian terkait, mampu menjelaskan definisi sektor non-

pertanian pedesaan. Sektor non-pertanian pedesaan masih jauh dari sifat homogen. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan di daerah pedesaan. Dalam beberapa studi tentang pembangunan pedesaan belum disebutkan definisi apapun secara eksplisit (ILO 2004; Kusago 2002; Bhaumik 2007).

Bisnis non pertanian pedesaan biasanya berskala kecil (kurang dari 50 karyawan) dan sering beroperasi di sektor ekonomi informal. Mereka sering dapat dikategorikan sebagai 'industri rumahan' (*cottage industries*) dengan hanya beberapa karyawan, dikerjakan di tempat (*premises*, tanah dan bangunan) sederhana

dengan pemasukan kapital (modal produksi) yang terbatas. Menurut Islam (2002) terdapat setidaknya empat argumen yang mendukung promosi sektor non pertanian pedesaan yaitu :

1. sektor non pertanian pedesaan menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja tumbuh;
2. sektor non pertanian pedesaan memberikan kontribusi pada pertumbuhan;
3. sektor non pertanian pedesaan dapat memperlambat migrasi desa-kota dan membantu mengendalikan kemacetan perkotaan dan polusi;
4. sektor non pertanian pedesaan mendorong pemerataan pendapatan dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan

Infrastruktur adalah faktor penentu aktifitas non pertanian (dev, 1990; Unni, 1991; Hazell and Haggblade, 1991; Bhalla, 1993; Lanjouw and Shariff, 2004). Perluasan jalan, transportasi, dan infrastruktur, komunikasi mengarah pada spesialisasi dan divisi tenaga kerja oleh rumah tangga pedesaan. Hal itu dapat mendorong perkembangan jaringan perdagangan, pemasaran, dan distribusi, termasuk pengaturan subkontrak sektor pertanian dan non pertanian pada kota setempat atau kota-kota besar.

▪ Perencanaan tata ruang dalam memfasilitasi kegiatan non pertanian

Menurut Sujana dalam buletin penataan ruang (2010), terdapat argumentasi yang mendasari pentingnya pengaturan ruang dalam kehidupan manusia. Pertama, keterbatasan ruang yang dimiliki sehingga diperlukan perencanaan dalam pemanfaatan ruang. Kedua, posisi geografis Indonesia yang terletak pada *ring of fire* serta rawan bencana alam. Ketiga, perkembangan jumlah penduduk membutuhkan ketersediaan ruang yang cukup untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Perencanaan tata ruang tidak hanya memperhatikan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut, tetapi juga memperhatikan rencana strategis penataan

ruang secara terintegrasi pada tingkat nasional maupun tingkat propinsi.

Mengembangkan sektor non pertanian pedesaan di pinggiran wilayah metropolitan harus didorong oleh kebijakan pembangunan. Karena kegiatan non-pertanian, yang berpotensi diakses oleh mayoritas masyarakat miskin di pedesaan, tentu membutuhkan ruang dan fasilitas serta infrastruktur, sehingga dengan mudah dapat dipahami bahwa mengembangkan kegiatan ini membutuhkan dorongan dari kebijakan spasial.

Perencanaan tata ruang ini menjadi bagian yang penting dalam pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan agar dalam pengembangannya dapat berjalan secara seimbang. Dengan adanya fasilitasi yang optimal melalui fungsi ruang dan struktur ruang dalam perencanaan tata ruang, maka dapat mendorong kegiatan non-pertanian yang produktif dan membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Perencanaan tata ruang harus menjadi bagian dalam proses menciptakan keseimbangan antar wilayah sebagai wujud dari pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, memfasilitasi kegiatan non-pertanian pedesaan melalui perencanaan tata ruang menjadi penting karena kegiatan ini mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang yang berkesinambungan.

Disamping itu, perencanaan tata ruang juga menuntut adanya peran serta (keterlibatan) masyarakat pelaku kegiatan non-pertanian pedesaan dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian pedesaan sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek.

▪ Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan suatu proses yangawali oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan

proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1981 dalam Walgito, 2000: 53).

▪ **Pendekatan partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang**

Menurut Bornby (1974) mengartikan partisipasi masyarakat sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan untuk pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (webster, 1976).

Partisipasi berkaitan dengan konsep relasi dan pembagian kekuasaan antara satu aktor dengan aktor yang lain didalam proses pengambilan keputusan. Terdapat 8 tangga tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969) yaitu: *Manipulation*, *Therapy*, *Informing* (informasi), *Consultation* (konsultasi), *Placation* (penentraman), *Partnership* (kerjasama), *Delegated power* (pelimpahan kekuasaan), *Citizen control* (kontrol masyarakat),

▪ **Mekanisme dan tahapan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang**

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan dalam upaya meferormulasi kebijakan tata ruang yang partisipatif (Sugiri, Buchori, dan Maa’rif 2013). Dalam penyusunan perencanaan tata ruang dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian pedesaan, diperlukan adanya keterlibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif yaitu untuk memahami kontruksi sosial masyarakat melalui bentuk partisipasi dan keterlibatan dalam tahapan proses perencanaan. Partisipasi dan keterlibatan dalam setiap proses yaitu pada tahap persiapan hingga tahap penyusunan rencana.

- a) Tahap persiapan, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik dari masyarakat setempat
- b) Pada tahap penelitian, partisipasi masyarakat memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi keinginan dari

masyarakat dalam pengembangan kegiatan non-pertanian

- c) Pada tahap analisis, partisipasi masyarakat akan memberikan informasi kemajuan dari proses perencanaan
- d) Pada tahap penyusunan rencana, dengan pelibatan masyarakat dengan pemangku kepentingan maka aspirasi masyarakat akan terakomodasi dalam perencanaan tata ruang terkait perencanaan pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yakni untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara, focus group discussion (FGD), dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder yaitu dengan telaah dokumen perencanaan dan studi literatur.

Berikut pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti : Pengumpulan Data, Reduksi Data (merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan), Display Data atau Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, Triangulasi dilakukan untuk meng *cross-check* data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok informan yang berbeda. Kesimpulan/verifikasi (Teknik penarikan simpulan adalah langkah yang esensial dalam proses penelitian). Penarikan simpulan ini didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data. Tahapan analisis dalam penelitian adalah:

1. Telaah dokumen perencanaan berupa RTRW Kabupaten Demak terhadap

- kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam.
2. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap struktur ruang dalam mengembangkan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam,
 3. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap pola/fungsi ruang dalam mengembangkan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam,
 4. Mengkaji keterlibatan masyarakat pelaku kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam dalam perencanaan tata ruang.

PROFIL KEGIATAN NON PERTANIAN PEDESAAN

Kegiatan non-pertanian yang berkembang di sektor industri kecil di Kecamatan Wonosalam yaitu industri kecil olahan makanan ringan dan kerajinan.

TABEL I
POTENSI KEGIATAN NON-PERTANIAN INDUSTRI MAKANANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN DI KECAMATAN WONOSLAM

NO	JENIS POTENSI	LOKASI
1	Industri Makanan dan Minuman	
a	Tempe	Botorejo, Trengguli
b	Kerupuk gandum, keripik tempe, keripik singkong, Keripik Bayam	Botorejo, Doreng, Jogoloyo, Mranak, Sidomulyo, Tlogorejo, Wonosalam
c	Makanan cemilan (makanan kecil terbuat dari ketan)	Bunderan, Jogoloyo, Kendaldoyong, Trengguli
d	Kue rangin	Lempuyang
e	Telur asin	Bunderan, Lempuyang
f	Pengasapan ikan, ikan pindang	Mojodemak, Mrisen, Pilangrejo
g	Air minum isi ulang	Getas, Trengguli
2	Industri Kerajinan	
h	Anyaman bambu (tampir, tudung saji, dll)	Getas, Mojodemak,
i	kaligrafi	Kalianyar, Tlogodowo
j	Batik	Karangrowo

Sumber : Dinas Perindustrian 2013

Bahan baku utama untuk industri rumah tangga seperti tempe, kerupuk gandum, keripik tempe, keripik singkong, kue rangin

didapat dari bahan baku lokal yang dari pertanian lokal yang terdapat di daerah tersebut.



Sumber: dokumentasi penyusun. 2014

Gambar 2
Kegiatan Industri Rumah Tangga Olahan Makanan Kecamatan Wonosalam

Untuk pengoloahan makanan lain, terdapat pengolahan ikan yakni pengasapan ikan yang terdapat di Desa Bunderan, bahan baku ikan ini didapatkan dari Juwana, Pati. Pengolah membeli langsung menuju tempat

penjualan ikan tersebut. Pengolahan indsutri telur asin, telur didapat dari hasil peternakan yaitu potensi lokal dari daerah itusendiri.



Sumber: dokumentasi penyusun. 2014

Gambar 3

Kegiatan Industri Rumah Tangga Pengolahan Ikan dan Telur di Kecamatan Wonosalam

Selain itu, di Kecamatan Wonosalam merupakan penghasil beras yang sangat berkembang juga dipengaruhi oleh tersedianya Penggilingan padi yang tersebar merata di setiap desa.

TABEL II
POTENSI KEGIATAN NON-PERTANIAN
DI KECAMATAN WONOSLAM, KABUPATEN DEMAK

1	Kegiatan bukan pertanian lainnya	Lokasi Kegiatan
a	Penggilingan Padi	Bunderan, Getas, Karangrejo, Karangrowo, Kendaldoyong, Karangkulon, Kuncir, Lempuyang, Mojodemak, Mrisen, Pilangrejo, Sidomulyo, Tlogorejo
b	Mebel	Botorejo, Wonosalam, Jogoloyo, Karangrejo, Kuncir, Mojodemak, Sidomulyo
c	Pengolahan kayu (kusen)	Bunderan, Jogoloyo
	Percetakan dan Fotocopy	Jogoloyo, Sidomulyo, Wonosalam

Sumber : Dinas Perindustrian 2013

ANALISIS

▪ Telaah Dokumen Perencanaan RTRW

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten hal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten yakni berupa arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka

panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

1. Kebijakan Serta Strategi berdasarkan RTRW kabupaten Demak

Pada telaah dokumen ini menghasilkan dampak dari beberapa kebijakan yang tercantum dalam RTRW. Beberapa kebijakan yang telah memberikan dampak positif terhadap kegiatan non-pertanian pedesaan yaitu:

- a) pengendalian alih fungsi lahan produktif, dimana hampir 55 % merupakan lahan pertanian, dengan pengendalian tersebut, berdampak pada hasil pertanian yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penyangga pangan nasional. Lahan persawahan di Demak memiliki luas 50.760 hektar, setiap tahun menghasilkan surplus beras mencapai 180 ribu ton lebih. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013).
- b) Kebijakan pengembangan komoditas pertanian yang prospektif, dengan penentuan zona-zonakawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan hortikultura. Kebijakan ini sudah memberikan dampak pada hasil panen jambu air yang semakin

tahun semakin meningkat. Namun, hasil pengembangan budidaya buah jambu tersebut belum memberikan dampak bagi kegiatan non-pertanian pedesaan, padahal jambu air dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pengolahan industri.

- c) Kebijakan pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang, strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang. Strategi ini sudah memberikan dampak positif pada kegiatan non-pertanian pedesaan yaitu dengan melakukan kegiatan industri dengan Penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran produk-industri. Jumlah kegiatan industri skala rumah tangga di pedesaan berupa pengolahan makanan dan minuman meningkat sangat cepat yaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Selain itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, Dinas Perindustrian telah memberikan bantuan kepada beberapa pelaku industri berupa pelatihan, pendampingan serta pemberian alat-alat untuk mendorong kegiatan non-pertanian pedesaan.

Sedangkan kebijakan yang belum berdampak pada kegiatan non-pertanian pedesaan yaitu;

- a) pengembangan kawasan pesisir ini belum berdampak pada kegiatan non-pertanian pedesaan. Karena lokasi kecamatan wonosalam yang tidak bersebelahan dengan kawasan pantai. Untuk strategi pengembangan kawasan pengolahan ikan ini juga belum memberikan dampak pada kegiatan non-pertanian berupa industri rumah tangga pengasapan ikan yang terdapat di desa Pilangrejo.

2. Arahan Struktur Ruang Wilayah dalam Mengembangkan Kegiatan Non-Pertanian Pedesaan

Rencana pusat pelayanan di Kecamatan Wonosalam ini sebagai PPK yaitu melayani skala kecamatan atau beberapa desa sebagai

pertanian, peternakan, perikanan dan permukiman.

Fungsi pelayanan kawasan yakni hanya melayani tingkat desa bukan berarti dapat dikesampingkan justru kecamatan-kecamatan tersebut berpotensi untuk mandiri sesuai dengan sektor basis di kecamatan tersebut. Pelayanan kawasan hanya dalam lingkup desa, maka perlu dilakukan pengembangan pusat pelayanan yaitu mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan dan pedesaan. Keterkaitan desa dan kota dalam kegiatan non-pertanian ini yaitu keterkaitan ekonomi yang mencerminkan kegiatan aliran modal dan perdagangan atau pemasaran hasil.

Namun perwujudan pusat kegiatan sistem pedesaan dilakukan melalui program Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan pengembangan pusat pelayanan pedesaan. KTP2D merupakan pendekatan pembangunan kawasan pedesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia. Pembangunan tersebut difokuskan pada kemandirian masyarakat sesuai azas TRIDAYA yang memiliki inti pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman.

Namun, pelaksanaan perwujudan sistem pedesaan ini masih belum dilakukan sama sekali di Kecamatan Wonosalam. Apabila dilihat pada waktu pelaksanaannya hingga tahun ini, seharusnya hal tersebut sudah selesai dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

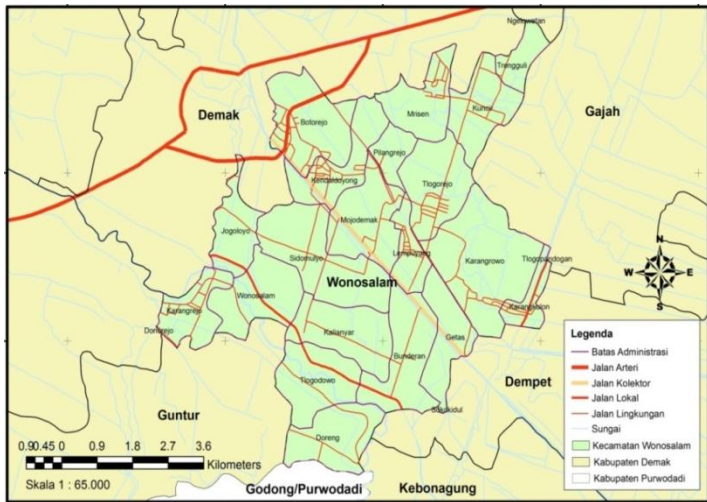
Pelaksanaan RTRW Kabupaten Demak sejauh ini masih difokuskan dalam pembuatan RDTR saja, yaitu sudah 7 RDTR Kecamatan yang telah disusun oleh Kabupaten Demak. Namun untuk pembangunan sarana dan prasarana belum sepenuhnya dikerjakan, seperti rencana pembangunan terminal, belum ada rencana lanjut dalam pembangunannya.

Beberapa program pengembangan sistem jaringan jalan telah dilaksanakan, namun belum

semua dilaksanakan berdasarkan *timeline* kegiatan program yang telah disusun melalui indikasi program. Perbaikan jaringan prasarana jalan lingkungan sudah dilaksanakan di beberapa titik, dengan betonisasi yang menghubungkan antar desa sehingga dapat memberikan keuntungan dengan kemudahan aksesibilitas.

Untuk arahan fungsi ruang lindung berdasarkan RTRW yaitu penjabaran fasilitasi kegiatan non pertanian dalam RTRW Kabupaten Demak berdasarkan pola ruang diketahui bahwa dalam rencana pola ruang Kabupaten Demak hanya menjabarkan zonasi kawasan lindung dan budidaya. Tidak dijelaskan secara rinci intensitas kegiatan non-pertanian dalam RTRW tersebut. Hal tersebut sebenarnya berguna untuk mengetahui tingkat pertumbuhan sektor tersebut dan juga sebagai indikator kegiatan dalam mendukung sektor perekonomian. Dan juga sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang diizinkan dan tidak diizinkan.

Dalam pengembangan sektor non-pertanian pedesaan sebagai kawasan budidaya ini tidak boleh bertentangan dengan batasan kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Demak. Kecamatan Wonosalam berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan rawan bencana alam yakni kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan kekeringan, kawasan rawan angin topan. Kawasan perlindungan setempat yakni kawasan sempadan saluran irigasi dan kawasan lindung bagi ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.



Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2014

Gambar 4

Peta Jaringan Jalan Kecamatan Wonosalam, Demak

Kondisi jalan di beberapa desa yang masih berbentuk tanah dapat menghambat warga ketika mereka beraktivitas.

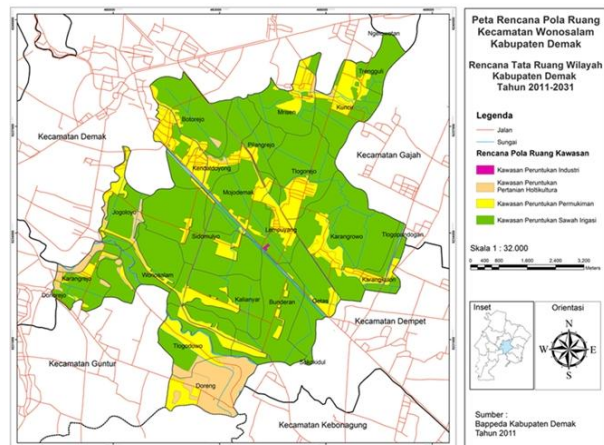


Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2014

Gambar 5

Gambar Kondisi Jalan Lingkungan di Kecamatan Wonosalam Demak

3. Arahan Pola/Fungsi Ruang Wilayah dalam Mengembangkan Kegiatan Non-Pertanian Pedesaan



Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2014

Gambar 6

Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

Dapat dilihat pada peta diatas bahwa kawasan budidaya yang terdapat di Kecamatan Wonosalam yaitu kawasan pertanian kawasan

tanaman pangan, holtikultura dan peternakan. Selain itu juga kawasan peruntukan perikanan yaitu pengembangan budidaya perikanan air tawar, pertambangan yaitu kawasan mineral bukan logam dan permukiman perkotaan.

4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah

Untuk kebijakan Penetapan kawasan strategis wilayah, penetapan kawasan strategis ini, tidak menghasilkan program yang memberikan keuntungan bagi pengembangan kegiatan non-pertanian khususnya di Kecamatan Wonosalam. Oleh karena itu, perlu adanya koneksi intra wilayah (antarkawasan/kabupaten/kota) dan inter regional (antarwilayah). Konektivitas wilayah sebagai pendukung ekonomi regional belum dipertimbangkan.

5. Ketentuan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Upaya pengendalian perkembangan dilakukan melalui:

- Pengarahan berbagai lokasi kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta/masyarakat.
- Pemberian izin bagi berbagai kegiatan pembangunan atau pemanfaatan ruang.

Untuk kawasan lindung, ketentuan yang ada relatif ketat memberikan pembatasan terhadap segala bentuk pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya.

▪ Analisis persepsi masyarakat Terhadap Struktur Ruang dalam Mengembangkan Kegiatan Non-Pertanian Pedesaan

Fungsi Kecamatan Wonosalam sebagai Pusat Pelayanan Kawasan tersebut memiliki fungsi pelayanan yaitu sebagai pertanian, peternakan, perikanan dan permukiman. Pada kondisi eksisting nya, sudah terdapat kegiatan Industri skala rumah tangga di Kecamatan Wonosalam. Namun dalam perkembangannya, aspek yang dirasakan masyarakat khususnya pelaku non-pertani dalam melakukan

kegiatannya menjumpai beberapa kendala yaitu pada aksesibilitas di Kecamatan Wonosalam.

Aksesibilitas antar wilayah kecamatan maupun desa di Kecamatan Wonosalam masih terdapat beberapa titik yang belum memadai. Masih banyak infrastruktur jalan yang kondisinya rusak, dan berlubang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaringan jalan sebagai penghubung antar wilayah desa masih belum mendukung secara optimal, seperti akses menuju Desa Lempuyang yang berkondisi masih berbatu dan tanah dan masih sulit untuk dijangkau oleh kendaraan roda empat. Pada musim hujan, jalan menuju Desa Karangrowo dan Tlogodowo becek dan sulit dilewati karena kondisi jalan masih berbentuk tanah.

Padahal jalan desa merupakan prasarana vital yang diharapkan dapat membuka isolasi kawasan dan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih belum memadai tersebut dapat memberikan dampak pada pengembangan kegiatan non pertanian, yaitu dalam aliran bahan baku, proses produksi serta jangkauan pemasaran hasil produksi. Seperti dikemukakan oleh (dev, 1990; Unni, 1991; Hazell and Haggblade, 1991; Bhalla, 1993; Lanjouw and Shariff, 2004) bahwa Infrastruktur adalah faktor penentu aktifitas non pertanian.

Menurut masyarakat Wonosalam sebagai pelaku kegiatan industri, mereka menjelaskan bahwa kendala yang ditemui dalam kegiatan non-pertanian yakni pada proses pemasaran, mereka mengeluhkan bahwa dalam lingkup penjualan hasil produksinya masih dalam skala lokal, yakni masih dalam lingkup kecamatan Wonosalam, yang hanya dipasarkan ke beberapa desa.

Hasil produksi yang masih dipasarkan dalam lingkup lokal ini juga dipengaruhi pada minimnya keahlian mereka dalam mengembangkan kreatifitas pengolahan Industri tersebut. Masyarakat membutuhkan pelatihan ketrampilan untuk mengembangkan kreasi terhadap pengembangan proses produksi tersebut, agar menghasilkan sesuatu olahan yang memiliki nilai jual yang tinggi serta proses

pemasarannya dapat semakin meluas seiring dengan pengembangan kreasi terhadap pengolahan industri tersebut. Sehingga produksi yang telah dihasilkan tidak hanya melayani kecamatan Wonosalam saja namun juga dapat melayani kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Demak.

Selain itu, terbatasnya jangkauan pemasaran tersebut juga dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh pelaku usaha, terbatasnya modal yang dimiliki oleh pelaku usaha, mereka membutuhkan modal tambahan untuk menghasilkan jumlah produksi yang lebih banyak untuk dipasarkan dalam lingkup yang lebih luas.

- **Analisis persepsi masyarakat Terhadap fungsi/pola Ruang dalam Mengembangkan Kegiatan Non-Pertanian Pedesaan**

Pada pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan sebagian kawasan budidaya ini diharapkan masyarakat lebih memperhatikan deliniasi kawasan lindung yakni memperhatikan kawasan banjir, rawan angin topan serta kawasan lindung bagi Ruang Terbuka Hijau sehingga pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan sebagai kawasan budidaya tidak diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan warga terkait dengan fungsi kawasan budidaya terkait dalam kegiatan non-pertanian pedesaan.

Dalam melakukan kegiatan non-pertanian pedesaan, lokasi industri rumah tangga yang sebagian merupakan industri olahan makanan ini tidak melanggar kawasan perlindungan. Sebagian besar masyarakat melakukan usaha industri bersamaan dengan fungsi hunian mereka. Masyarakat lingkungan sekitar lokasi kegiatan juga tidak mempermasalahkan, selama kegiatan industri yang mereka jalani tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat.

Kegiatan industri skala rumah tangga diperbolehkan untuk dikembangkan dan bercampur dengan kawasan perumahan dengan izin bersyarat yaitu dengan kriteria tidak menimbulkan dampak lingkungan, memperoleh

rekomendasi dan persetujuan dari dinas terkait, memperoleh persetujuan dari ketua RT/RW setempat, dan dari masyarakat setempat.

Aspek yang dirasakan masyarakat terhadap fungsi ruang dalam mengembangkan Kegiatan Non-Pertanian Pedesaan berdasarkan rencana pola ruang kawasan budidaya ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat tidak merasa kesulitan dalam melakukan izin lokasi pemanfaatan hunian yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan industri.

Kawasan budidaya yang terdapat di Kecamatan Wonosalam ini juga merupakan kawasan pertanian tanaman pangan di antaranya ubi kayu, ubi jalar, serta jambu air sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku lokal produk olahan makanan. Potensi industri kecil di Kecamatan Wonosalam didominasi oleh industri makanan ringan berupa olahan dari tanaman pangan dan hasil perkebunan serta bambu maupun kayu yang digunakan untuk industri kerajinan.

Kegiatan industri skala rumah tangga ini merupakan salah satu sektor non-pertanian pedesaan yang potensial untuk dikembangkan. Sehingga apabila arahan dalam rencana tata ruang mampu mendukung dalam pengembangan kegiatan ini, sebagian besar masyarakat miskin pedesaan mampu terlibat dalam kegiatan non-pertanian produktif dan dapat mendorong dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut mengenai penataan pengolahan kawasan industri bagi kegiatan non-pertanian pedesaan dalam pola pemanfaatan ruang untuk kawasan industri rumah tangga. Selain itu, penjabaran tersebut juga berguna dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang yaitu kegiatan pengisi ruang yang diizinkan, tidak diizinkan serta diizinkan dengan persyaratan tertentu.

▪ **Kontruksi masyarakat wonosalam dalam penyusunan RTRW**

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan proses penyusunan RTRW Kabupaten Demak, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang secara umum pihak masyarakat yang dilibatkan yakni perwakilan dari aparat kecamatan Wonosalam. Namun, dalam pelibatan tersebut hanya pada kegiatan rapat persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tidak ada kegiatan lanjutan terkait dengan penyusunan RTRW tersebut.

Aparat Kecamatan menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai rencana tata ruang yakni RTRW telah dilakukan, namun sosialisasi tersebut hanya dilaksanakan pada penerima keputusan saja. Selain itu, pada saat konsultasi publik mereka juga tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi rencana tata ruang.

Berikut merupakan tipologi partisipasi publik di Kecamatan Wonosalam berkaitan dengan proses penyusunan RTRW Kabupaten Demak berdasarkan tangga tipologi partisipasi publik menurut Arnstein berkaitan dengan proses penyusunan RTRW Kabupaten Demak:

1. *Manipulation*, merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, pada tahapan ini masyarakat Kecamatan Wonosalam hanya sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Semua usulan perencanaan dianggap sudah paling bagus dan pertemuan dengan masyarakat diadakan hanya untuk memenuhi tanggung jawab administrasi proyek saja. Pengikutsertaan masyarakat ini hanya dianggap pelengkap saja, masyarakat tidak benar benar untuk diberikan kesempatan dalam memberikan saran atau masukan dalam perencanaan tersebut.
2. *Therapy*, pada tahap ini tujuan pendekatan ini adalah untuk mengobati (masyarakat dianggap lemah atau sakit) dan mengajari masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat banyak

memberikan masukan dalam suatu kegiatan yang berguna untuk kepentingan pemerintah. Masyarakat mulai diikutsertakan dalam proses perencanaan. Namun pada tahap ini, masyarakat juga masih diajarkan dan diberi pemahaman mengenai partisipasi warga dalam pembuatan perencanaan dengan partisipatif.

3. *Informing* (informasi), merupakan langkah paling awal dari upaya mawadahi partisipasi melalui kontak langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana. pada tahap ini, pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan tersebut, namun masukan dari masyarakat tersebut tidak banyak berpengaruh dalam perencanaan tersebut, karena informasi tersebut hanya bersifat satu arah yakni informasi yang diberikan dari pemangku kepentingan.

Partisipasi masyarakat Wonosalam berada pada tingkat ketiga yaitu tingkat *informing* (informasi). Berdasarkan tangga tersebut, Pada tingkat 1,2 dan 3 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau *non participation* dalam *Degrees of Citizen*. Pada tingkat ini tidak bertujuan memberi kesempatan orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau pelaksanaan program tetapi memungkinkan pemegang kekuasaan untuk memberikan pendidikan atau tindakan terhadap partisipan.

2. Tahapan Perencanaan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Dalam penyusunan perencanaan tata ruang dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian pedesaan, diperlukan adanya keterlibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif yaitu untuk memahami kontruksi sosial masyarakat melalui bentuk partisipasi dan keterlibatan dalam tahapan proses perencanaan. Partisipasi dan keterlibatan dalam setiap proses yaitu pada tahap persiapan hingga tahap penyusunan rencana.

Proses penyusunan RTRW pada tahap persiapan hingga tahap penyusunan rencana yaitu:

1. Pada tahap persiapan, tahapan ini masyarakat dilibatkan dalam untuk memberikan informasi mengenai bagaimana karakteristik masyarakat diwilayah nya. Mereka seharusnya dilibatkan, karena masyarakat mengetahui kondisi eksisting wilayah dan terlibat langsung dalam kegiatan yang mereka jalani. Ketika dikonfirmasi dalam kegiatan FGD yang dilakukan di Kecamatan Wonosalam dengan peserta para pelaku kegiatan non-pertanian yang terdiri dari beberapa desa. Mereka mengakui tidak adanya wawancara ringan kepada pihak masyarakat juga termasuk pelaku kegiatan non-pertanian yang mengetahui kondisi serta karakteristik wilayahnya. Tidak ada pelibatan masyarakat beserta perwakilan pemimpin lokal pada tahapan ini. Walaupun diharapkan pihak yang terlibat yaitu perencana (konsultan), masyarakat beserta perwakilan pemimpin lokal.
2. Dalam tahap penelitian/survey, pada tahap ini pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan/informasi mengenai potensi dan masalah terkait pengembangan kegiatan non-pertanian yang terdapat di wilayah mereka. Warga seharusnya dilibatkan sebagai perwakilan dari jenis jenis pelaku usaha yang mengerti kondisi permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, pihak-pihak lain yang dilibatkan yakni tokoh masyarakat dan perencana (konsultan). Pada tahap ini tidak dilakukan sama sekali penjangkaran masukan atau informasi tersebut baik melalui pemberian kuisisioner kepada masyarakat ataupun dengan mengadakan FGD dari pihak terkait. Dengan demikian, dalam tahap

apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan kegiatan non-pertanian di wilayah mereka belum terakomodasi dengan maksimal

3. Dalam tahap analisis, keterlibatan dalam tahap ini yakni masyarakat penting untuk memberikan usulan terhadap hasil analisis sebelum nantinya akan dilanjutkan dalam tahapan penyusunan rencana. Pada kenyataannya masyarakat tidak mendapatkan konfirmasi terkait dengan hasil yang telah disusun apakah telah sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan aspirasi mereka sudah tertampung.
4. Dalam tahap terakhir, yaitu pada tahap penyusunan rencana. seharusnya Partisipasi masyarakat perlu dilakukan pada kegiatan seminar draft rencana, yaitu diskusi bersama dengan pihak-pihak terkait yakni pihak pemangku kepentingan (masyarakat), perencana (konsultan) serta akademisi. Pada tahapan ini masyarakat juga tidak turut berpartisipasi dalam pemberian masukan terkait rencana yang akan diarahkan dalam pengembangan kegiatan non-pertanian. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kebijakan rencana tata ruang yang telah berlaku dari tahun 2011.

Maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang secara umum pihak masyarakat khususnya pelaku kegiatan non-pertanian sama sekali tidak dilibatkan. Perwakilan masyarakat Kecamatan Wonosalam ini diwakilkan oleh aparat Kecamatan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Demak. Namun, dalam pelibatan tersebut hanya pada kegiatan rapat persiapan penyusunan RTRW. Tidak ada kegiatan lanjutan terkait dengan penyusunan RTRW.

Dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah belum tepat sasaran/ belum mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan tersebut khususnya proses penyusunan RTRW. Hal ini dikarenakan perwakilan masyarakat yang diundang belum mampu memberikan aspirasi tentang usaha yang mereka jalankan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Wonosalam secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Perkembangan kegiatan non-pertanian ini sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur yang memadai dan mendukung untuk pengembangan kegiatan ini. Kondisi prasarana/infrastruktur di Kecamatan Wonosalam masih terdapat beberapa titik yang belum memadai serta belum mampu membentuk keterkaitan spasial yang mampu mendukung dalam kegiatannya.

Selanjutnya, dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian pedesaan menurut pola ruang berdasarkan pada RTRW Kabupaten Demak yakni hanya menjabarkan zonasi kawasan lindung dan budidaya. Tidak dijelaskan secara rinci intensitas kegiatan non-pertanian dalam RTRW tersebut. Aktivitas non-farm yang kini umumnya berlokasi di dalam pemukiman tidak ada pedoman atau kebijakan yang ditetapkan dalam RTRW untuk membatasi ataupun mendorong penggunaan campuran (*mix use*) semacam ini.

Lokasi kegiatan non-pertanian yang terletak pada kawasan perumahan yaitu kegiatan industri skala rumah tangga diperbolehkan untuk dikembangkan dan bercampur dengan kawasan perumahan dengan izin bersyarat yaitu dengan kriteria tidak menimbulkan dampak lingkungan, memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari dinas terkait, memperoleh persetujuan dari ketua RT/RW setempat, dan dari masyarakat setempat.

Bahwa RTRW Kabupaten Demak tahun 2011-2031 tidak seluruhnya bersifat menghambat bagi pengembangan kegiatan non-pertanian di Kecamatan Wonosalam. Terdapat Kebijakan yang mendukung yakni; Kebijakan Serta Strategi Berdasarkan RTRW, Kebijakan arahan fungsi ruang dalam

mengembangkan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam. Dan yang menghambat yakni; arahan struktur ruang dalam mengembangkan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam, serta penetapan kawasan strategis wilayah serta Ketentuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan telaah dokumen ini bahwa kebijakan tata ruang jika diterapkan di Kecamatan Wonosalam dapat mendorong pengembangan Sektor Non-pertanian pedesaan yang dapat membuat masyarakat wonosalam terlibat.

Namun dalam proses penyusunan kebijakan, masyarakat yang dilibatkan belum tepat sasaran. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam proses penyusunannya tidak bersesuaian dengan proses masyarakat mengkonstruksi suatu aspek pembangunan sehingga menunjukkan bahwa pendekatan secara partisipatif belum diterapkan dengan baik dalam proses perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan adanya rencana yang mampu mengakomodasi *community needs* (kebutuhan masyarakat) yang mampu mendukung kegiatan non-pertanian yang dikaji dari proses input hingga distribusi.

REKOMENDASI

- Dalam menyusun kebijakan spasial yaitu rencana tata ruang, dalam penyusunan arahan dalam perencanaan tersebut diharapkan lebih mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan non-pertanian pedesaan yang merupakan kegiatan berpotensi untuk dikembangkan
- Perencanaan ini harus menghasilkan struktur dan fungsi ruang yang mampu mendorong keterlibatan sebagian besar masyarakat dalam sektor non-pertanian yang produktif dan terkait dengan baik dengan potensi yang terdapat di wilayah setempat.
- Perkembangan kegiatan non-pertanian ini sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur yang memadai dan kurang

mendukung untuk pengembangan kegiatan ini. Oleh karena itu, perbaikan kondisi infrastruktur seperti jalan, pengolahan air limbah ini perlu dilakukan agar diharapkan dapat mendorong pengembangan kegiatan non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S.R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of American Institute of Planners*, volume 35 (4), 216-224.
- Bappeda Kabupaten Demak 2014. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak 2011-2031*, Demak: Bappeda Kabupaten Demak.
- Bhaumik, S.K. 2007 Diversification of Employment and Earnings by Rural Households in West Bengal, *Indian Journal of Agricultural Economics*, 62 (4), 585-606.
- Binswanger, H.P. 1983. Agricultural growth and rural nonfarm activities, *Finance and Development*, 20 (2), pg. 38-40.
- Choe, Yang-Boo (1986): "M-Cycle Hypothesis, Non-Farm Activities and Industrialization in Asian Monsoon Economy", in Y.B. Choe and F. Lo (eds.), *Rural Industrialization and Non-farm Activities of Asian Farmers*, Seoul: Korea Rural Economics Institute.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publication, Inc.
- Dev, Mahendra S. (1990): "Non-Agricultural Employment in Rural India: Evidence at a Disaggregated Level", *Economic and Political Weekly*, Vol. 26, No. 28.
- Gordon, Ann and Craig, Catherine 2001. Rural Non-Farm Activities and Poverty Allevation in Sub-Saharan Africa. *Policy Series 14*. Chatham, UK: Natural Resources Institute.
- Haggblade, S., P. Hazell and T. Reardon. 2010. The Rural Non-Farm Economy: Prospect for Growth and Poverty Reduction. *The International Journal of World Development*, Vol 38 (10), 1429-1441.
- ILO 2004. Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan (Rural
- Islam, Nurul. 1997. "The Nonfarm Sector And Rural Development Review Off Issues And Evidence Food". *Agriculture, And The Environment Discussion*". *International food policy research institute*. Paper 22.
- Lanjouw, Peter and G. Fader. 2001. Rural Non-Farm Activities and Rural Development From Experience Towards Strategy. Washington DC: World Bank.
- Kusago, T. 2002. *Regional Disparity in Accessibility to Non-farm Economic Involvement among Rural Indonesian Households*, *ASEAN Economic Bulletin*, 19 (3), 290-301.
- Royat, Sujana. 2010. Penataan Ruang Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Buletin tata ruang, edisi juli-agustus 2010.
- Sharna, H.R. 2009. "Rural Non-Farm Employment in Himachal Pradesh, 1971-2001 - A District Level Analysis" dalam *Indian Journal of Agricultural Economics*; Apr-Jun 2009; 64, 2; ProQuest Agriculture Journals pp. 208.
- Sugiri, A., I. Buchori and S. Ma'arif. 2011. Towards Participatory Spatial Policy : Facilitating Rural Non-farm activities in Susukan Suburb of Semarang Metropolitan Region. *The International Journal of Civic, Political and Community Studies*, Vol 12, 2014. , *Forthcoming*,